

**PENOLAKAN PKL PEREMPUAN TERHADAP RELOKASI
PENATAAN PANTAI PURUS KOTA PADANG
TAHUN 2023**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :



**INTAN ARDIANA
2010832004**

Pembimbing:

Drs. Tamrin, M.Si

Dr. Zulfadli, M.Si

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penolakan PKL Perempuan terhadap kebijakan Pemerintah Kota atas relokasi penataan Pantai Purus Kota Padang. Penolakan tersebut muncul sebagai respons terhadap kebijakan Pemerintah dalam menata kawasan pantai, yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi PKL di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sejarah munculnya penolakan PKL Pantai Purus, untuk menjelaskan bentuk penolakan PKL Perempuan Pantai Purus, dan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi Penolakan PKL Perempuan Pantai Purus Kota Padang tahun 2023. Data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan pemilihan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Triangulasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan pakar, serta lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa PKL Perempuan melakukan penolakan secara terbuka melalui demonstrasi, blokade akses jalan, dan pertunjukan visual yang menarik perhatian publik. Penolakan tersebut sebagian besar didorong oleh motivasi ekonomi, karena banyak PKL Perempuan menggantungkan hidupnya pada usaha di Pantai Purus dan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan setelah dipindahkan ke pasar kuliner. Dalam penolakannya PKL juga berupaya dengan meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang dan juga melalui *framing* yang diangkat dengan memunculkan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan pada penelitian ini yang dikemukakan oleh James Scoot mengenai konsep resistensi terbuka dalam gerakan sosial dan pandangan MacCarthy tentang pentingnya demonstrasi dalam dinamika gerakan sosial, serta kelompok kepentingan menurut pandangan Almond dan Powell. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan PKL Perempuan tidak berhasil mempengaruhi keputusan pemerintah. Diharapkan adanya dialog yang lebih baik antara pemerintah dan PKL dalam menangani isu-isu penataan kota dan kesejahteraan PKL.

Kata kunci: Penolakan PKL Perempuan, Demonstrasi terbuka, *Framing* isu perempuan.

ABSTRACT

This research is motivated by the rejection of women street vendors to the City Government's policy on the relocation of Purus Beach arrangement in Padang City. The rejection arises as a response to the Government's policy in organizing the beach area, which has a direct impact on the economic life of street vendors in the vicinity. This research aims to analyze and explain the history of the rejection of Purus Beach Street Vendors, to explain the form of rejection of Purus Beach Women Street Vendors, and to explain the factors that influence the rejection of Purus Beach Women Street Vendors in Padang City in 2023. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study research design. Data collection techniques involve interviews, observation, and documentation, with the selection of informants using purposive sampling techniques. Triangulation used source and expert triangulation techniques, and the research location was in Padang City. The results of the study show that female street vendors openly refuse through demonstrations, road access blockades, and visual performances that attract public attention. The rejection is largely driven by economic motivations, as many female street vendors depend on businesses at Purus Beach and experienced a significant decrease in income after being moved to the culinary market. In their rejection, PKL also tried to ask for legal assistance from the Padang City Legal Aid Institute and also through framing raised by raising issues related to women. This is in line with the theory used in this research proposed by James Scoot regarding the concept of open resistance in social movements and MacCarthy's view of the importance of demonstrations in the dynamics of social movements, as well as interest groups according to Almond and Powel's views. Nonetheless, this research shows that the rejection of PKL Perempuan did not succeed in influencing the government's decision. It is hoped that there will be better dialogue between the government and street vendors in addressing issues of urban planning and street vendor welfare.

Keywords: *Rejection of women street vendors, Public demonstration, Framing of women's issues.*